



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 28 April 2025/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG INFRASTRUKTUR DAN
PEMBANGUNAN KEWILAYAHAN

UNIT KERJA : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA
DAN PRASARANA PERMUKIMAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RONNY ARIULY HUTAHAYAN
2. Jabatan : DEPUTI BIDANG KOORDINASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN DAN SARANA
DAN PRASARANA PERMUKIMAN
3. NHK : 1012598

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 9.650.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 185 m2/350 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 7.200.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 109 m2/109 m2 di KAB / KOTA KOTA
JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 2.200.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m2/100 m2 di KAB / KOTA
BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 970.000.000

1. MOBIL, BMW 520I Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 420.000.000
2. MOBIL, MERCEDEZ BENZ ML400 Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 573.566.340

D. SURAT BERHARGA Rp. 860.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.094.250.000

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 13.147.816.340

III. HUTANG Rp. 4.185.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 8.962.816.340



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.